BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan persatuan yang bahagia dan kekal. Karena Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, maka wajar jika kedua jenis itu berpasangan. Kemudian untuk memenuhi hajat manusia dapat disalurkan secara sah melalui ikatan perkawinan.

Burgerlijk Wetboek (BW) adalah peraturan perundang-undangan untuk barang-barang asal Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1848 dan dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi.¹

Secara umum, ada dua kategori hukum: hukum perdata dan hukum privat. Aturan hukum yang mengatur kepentingan umum dikenal dengan hukum publik, sedangkan aturan yang mengatur kepentingan pribadi dikenal dengan hukum perdata.

¹ Titik triwulan, *hukum perdata dalam sistem Hukum Nasional*, Kencana, (Jakarta: 2011), cetakan ke-3

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno. sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang.

Semua aturan hukum yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam hubungan keluarga dan kelompok sosial secara kolektif disebut sebagai hukum perdata. Ada dua kategori hukum perdata: hukum perdata formal dan hukum perdata material.

1. Kepentingan perdata setiap subjek hukum diatur oleh hukum perdata materiil.
2. Aturan formal hukum perdata mengatur bagaimana seseorang harus melindungi haknya ketika dilanggar oleh orang lain. Karena hukum perdata formil berfungsi untuk menegakkan hukum perdata materiil apabila dilanggar, maka hukum perdata formil menjunjung tinggi hukum perdata materiil.²

Mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata adalah mengacu pada ketentuan Pasal 12 Peraturan pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

² M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli waris dalam Persepektif Hukum Islam dan KUHPperdata*

Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab instate. Sehingga seharusnya seorang anak kandung yang di lahirkan dalam perkawinan yang sah. Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan, sebagaimana telah di jelaskan juga dalam pasal 11,12,³ tentang peraturan pemerintah indonesia:

Ada pun ketentuan di dalam PASAL 11 yaitu

Pengangan anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing sebagaimana di maksud dalam pasal 17 huruf b, meliputi :

1. Pengangkatan anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing dan
2. Pengangkatan anak warga negara asing di indonesia oleh warga negara indonesia.
3. Pengangkatan anak sebagaimana di jelaskan dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan

Ada pun ketentuan PASAL 12 yaitu :

1. Syarat anak yang akan di angkat, meliputi :
 - a. Belum berusia 18 tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan

³ Lihat peraturan pemerintah indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.

Praktek mengadopsi anak orang lain atau mengadopsi anak orang lain sebagai anak-anak dikenal sebagai "Tabanni" dalam bahasa Arab, sedangkan konsep adopsi disebut sebagai "adopsi" dalam Staatsblad 1917–129. Istilah ini berasal dari kata Belanda adoptie, atau adoptie dalam bahasa Inggris, dan berarti “mengambil (mengadopsi) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri,” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjalankan adat dengan banyak sebutan mengasuh atau menjaga anak kerabat dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu.

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi – konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Demikian pula kematian seseorang mempunyai akibat dan akibat hukum bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu kematiannya menimbulkan kewajiban yang berkaitan

dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematiannya, timbul akibat hukum lain secara wajar, yaitu hubungan pengetahuan hukum keluarga (ahli waris) dengan segala hak warisnya. Meninggalnya seseorang menyebabkan munculnya cabang hukum yang membahas tentang cara menyelesaikan masalah waris dalam keluarga yang disebut hukum waris.

Kitab undang – undang perdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 528 kitab undang – undang perdata. Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdato menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdato, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato.⁴ Dalam sistem hukum waris menurut kitab undang – undang hukum perdata yang selanjutnya disebut KUHPER, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris karena kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda uit eigen hoofde), dan
2. Ahli waris karena pergantian tempat (dalam bahasa *Belanda bij plaatsvervulling*).

Sedangkan KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”⁵ Jadi

⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Penerbit Nuansa Aulia ,Bandung: 2018), Cetakan ke-1

⁵ Kitap Undang-Undang Hukum Perdata , (Wipress, Jakarta: 2007), h 194

harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerduta) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerduta).

Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan dalam KUHPerduta untuk memperoleh warisan yaitu :

- b. Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab undang undang Pasal 830 KUH Perdata.

Meninggalnya si pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Meninggalnya si pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (meninggal hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
2. Meninggal demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah meninggal dunia.
 - a. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :
 1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.

2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menggantikan ahli waris terdahulu melalui pewarisan, disebut juga dengan pewarisan pengganti. Menurut Pasal 852 Ayat 2 KUH Perdata, dalam hal mewaris dengan penggantian tempat, ahli waris adalah mereka yang mewarisi dengan penggantian tempat dan mewarisi saham demi saham.

Karena hukum waris perdata dan hukum keluarga saling terkait erat, maka penting juga untuk memahami sistem hukum waris tertentu yang dimaksud, termasuk sistem keluarga, sistem pewarisan, jenis warisan, dan proses pewarisan.

Hukum waris di dalam hukum perdata, terdapat sistem kekerabatan bilateral atau paternal yang memungkinkan dilakukannya penelusuran keturunan baik dari pihak suami maupun pihak istri. Sistem waris yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem perseorangan; baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris yang sama. Ahli waris mewarisi baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Hukum waris perdata, ada ketentuan umum yang menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia (ahli waris), maka kewajiban hukumnya dan segera beralih kepada ahli waris sepanjang kewajiban itu termasuk dalam lingkup hukum harta kekayaan, atau dalam kata lain, adalah kewajiban yang memiliki nilai moneter.

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Menurut ketentuan hukum perdata BW, pengangkatan anak sah menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak, yaitu hubungan keluarga yang sama dengan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri, termasuk menggunakan nama orang tua angkat dan turut serta dalam pernikahan mereka sebagai seorang anak. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkatnya menurut *legitieme portie* untuk segala macam warisan dan sebagai ahli waris tunggal dari orang tua angkatnya.

Tujuan utama dari prosedur pewarisan adalah pembagian warisan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Elemen paling kritis yang harus berfungsi adalah perdamaian, harmoni, dan harmoni. Aspek mendasar dari kedekatan dalam kehidupan keluarga yang harus digalakkan adalah kesepakatan dan diskusi.

Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan

yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.

Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahlinya.

ketika orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai pada dua pokok permasalahan, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁶

Peradilan, dikenal dua bentuk penyelesaian sengketa yaitu secara Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara baik pidana maupun perdata yang dilakukan di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Sebaliknya, Non Litigasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan jalur alternatif yang dilakukan di luar pengadilan, yang lazim dinamakan dengan (ADR). Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

⁶ 1Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Kencana, Depok: 2017), 291.

di Pengadilan. Prinsip winwin solution yang menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama, tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan, menjadi magnet utama bagi masyarakat untuk lebih memilih menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur non litigasi.

Bapak ngateman dan ibu siyam menikah pada tahun 1987, selama beliau menikah ia tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak, namun bapak ngateman dengan ibu siyam mengangkat anak sejak bayi baru lahir, yang mana anak angkat tersebut bernama wahytu dewi pujiati, saat menangkat bayi itu mereka belum mempunyai apa apa, jadi si ibu siyam di bekali tanah berupa dua bidang tanah yang mana tanah tersebut adalah harta bawaan ibu siyam, dan pada akhirnya tanah tersebut menjadi banyak lebih dari 8 hektar. kemudian ibu siyam meninggal dunia pada hari senin tanggal 26 desember 2016 ibu siyam meninggal dunia karena sakit saat ia meninggal dunia ibu siyam berusia kurang lebih 52 tahun.

Setelah ibu siyam meninggal satu tahun yg lalu bapak ngateman menikah lagi dengan ibu lena teresia pada tanggal 4 desember 2017, selama pernikahannya beliau tidak memiliki seorang anak atau tidak memiliki keturunan. selama bapak ngateman dan ibu lena theresia menikah ia tidak menambah kebun sawit malah menjual tanah kebun sawit sekitar 2 hektar, tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga kandung ibu siyam yang mana seharusnya bapak ngateman dan ibu lena theresia membagi terlebih dahulu harta warisan milik almarhumha ibu siyam, bahwa hasil dari penjualan kebun kelapa sawit, bapak ngateman dengan ibu lena teresia membeli satu

unit mobil merek Terios berwarna silver, kemudian pada tanggal 5 desember 2022 ngateman bin sumaditar meninggal dunia pada saat itu alm bapak ngateman bin sumaditar meninggal dunia berusia 58 tahun. Pada saat bapak ngateman meninggal dunia tanpa surat wasiat, setelah meninggal semua harta dan aset di kuasai ibu tiri dan sang anak tidak diberikan apapun seperti uang jajan, sehingga pihak keluarga melakukan penyelesaiannya

Berdasarkan urain diatas, timbul suatu pertanyaan yang membuat penulis tertarik untuk mempelajari dan membahasnya. Penulis tertarik untuk membahas mengenai **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HATA WARISAN ANTARA IBU TIRI DENGAN ANAK ANGKAT DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus putusan nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ppg ”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan antara ibu tiri dengan anak angkat melalui pengadilan agama berdasarkan putusan nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ppg ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan antara ibu tiri dengan anak angkat melalui pengadilan agam berdasarkan putusan nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Ppg

?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan antara ibu tiri dan anak angkat melalui kantor desa pasir agung.
2. Untuk mengetahui penyebab/faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian sengketa harta warisan antara ibu tiri dan anak angkat melalui kantor desa pasir agung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis.

Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan.

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai putusan Pengadilan

agama tentang pembagian warisan. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian.

3. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja sebagai solusi mereka bilamana terjadi permasalahan sengketa pembagian warisan antar ahli waris dalam keluarga tanpa harus berurusan dengan Pengadilan dan juga sebagai solusi bagi masyarakat bila mereka berhadapan dengan sengketa tersebut dan berurusan dengan Pengadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pembagian warisan antar ahli waris agar tidak terjadi sengketa waris dalam pembagian warisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Pengertian Perkawinan Secara Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan tentang :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “nikaahun” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan tazawwaja. Jadi kata nikah berarti “adh-dhammu wattadaakhul” artinya bertindih dan memasukkan, (Rahmat Hakim, 2000 : 11) sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “adh-dhmmu wal-jam’u” artinya bertindih dan berkumpul.

1. Hukum Nikah

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam

⁷ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)

artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :⁸

- a. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan.
- c. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan.
- d. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- e. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

2.2 Pengertian Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang dsering disebut adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa belanda. Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris *adoption*,

⁸ Musthofa , *Pengangkatan Anak*, (Kencana, Jakarta: 2008), cet, ke- 2. h. 9

mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.⁹ Pada saat islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat.¹⁰

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat “ adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.¹¹

Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi hukum

⁹ Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, (Aksara Baru, Jakarta: 1987), cet, ke- 1 h. 4

¹⁰ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan anak perspektif islam*, (Kencana, Jakarta: 2008), cet, ke- 1 h. 19

¹¹ Ibid, h. 192

kekeluargaan tidak dapat dikesampingkan. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Memberikan status hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Contohnya seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya demikian juga dalam bidang kewarisan.

Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bila mana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

2.3 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam Klasik, pengangkatan anak angkat (*tabanni*) memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkatan anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (*nasab*) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak

kandung (nasabiyah). Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.¹²

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama menurut Hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan-an pengawasan dari orang tua asli kepada orang tua angkat, hanya merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Menguatnya keinginan masyarakat beragama Islam untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Masyarakat umumnya telah mengenal apa yang disebut lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung.

Surat AL- Ahzab ayat 5, yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan” Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan

¹² Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, h 39.

tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.¹³ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat Undang - Undang Republik Indonesia memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Menguatnya keinginan masyarakat beragama Islam untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan peng- angkat-an anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, untuk itu maka masyarakat yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka pada tanggal 20 april 2006 lahirlah Undang - Undang Nomor. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam, yang sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku

¹³ (Fauzan, 2007, *Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak, Varia Peradilan*, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007, h. 32)

pemeluk Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak.¹⁴

1. mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. k agama Islam.

Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab

¹⁴ Nasroen Haron dkk, 1996, *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 29

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.¹⁵

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya mengatur tentang “kedudukan anak” yaitu dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”¹⁶

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyamakan “seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat”.¹⁷

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti

¹⁵ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, h. 83.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, tentang Kedudukan Anak

¹⁷ Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Kedudukan Anak Angkat

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.¹⁸

2.4 Kedudukan Anak Angkat Sebagai HKI / Waris

Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak berdasarkan KUH Perdata. Akan tetapi Perang Dunia II di Belanda telah lahir Undang - Undang Tentang Pengangkatan Anak, yaitu : Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan: bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.¹⁹

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyamakan “seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat”.²⁰ Dengan demikian, Dalam sistem Hukum Waris BW, “atas

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Ibid, h 7

²⁰ Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Kedudukan Anak Angkat

suatu perwarisan berlakuan ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat,” selanjutnya mengenai harta atau barang peninggalan di atur dalam Pasal 849 BW *Burgerlijk Wetboek*, yang menyatakan bahwa: Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.²¹ Sedangkan yang menjadi syarat mutlak adalah harus ada orang yang meninggal (Pasal 830 KUH Perdata), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata) bahwa pewaris belum meninggal. Syarat kematian atau harus ada orang yang meninggal ini disamping syarat umum juga merupakan syarat mutlak.²²

Terkait dengan harta warisan tidak seperti halnya pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono-gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagai ketentuan Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”²³

²¹ Op Cit, KUH Perdata, Pasal 849

²² Op Cit, Djaja S. Meliala, h. 198

²³ Ibid

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Sedangkan hak mewaris anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua kandungnya harus ditinjau menurut Stb. No 129 Tahun 1917 dan menurut UU No 23 Tahun 2002.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.²⁴

Hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya dapat terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya. Adapun pengertian dari wasiat dan hibah adalah sebagai berikut :

1. Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang hendak dilakukannya terhadap hartanya setelah ia meninggal. Biasanya

²⁴ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006, h. 163

wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, apabila pewaris dalam keadaan sakit parah atau hendak berpergian jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi, maka hal ini harus diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa. Pada dasarnya, hukum adat tidak menentukan bahwa wasiat itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 931 KUHPdata. Hal itu dapat saja dilakukan, tapi biasanya hanya berlaku menurut hukum adat setempat, yang mana hanya diucapkan dihadapan istri, anak-anak atau anggota keluarga terdekat lainnya. Bagi keluarga yang beragama islam, maka wasiat itu harus diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada kesediaan (kabal) dari si penerima.

2. Hibah

Hibah berasal dari Bahasa Arab yang artinya melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Secara umum, pengertian hibah adalah pemberian ketika si empunya harta masih hidup. Pasal 171 KHI mengartikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Jika ditinjau dari pengertiannya, hibah tidak memiliki hubungan atau keterikatan secara langsung dengan waris di dalam Islam. Mengapa demikian, sebab hibah merupakan aqad yang ditujukan untuk memberikan harta kepada orang lain saat masih hidup tanpa adanya imbalan, sedangkan waris sendiri ialah segala sesuatu tentang apa dan bagaimana hak-hak dan

kewajiban mengenai kekayaan seseorang ketika ia meninggal akan beralih kepada orang lain pada saat ia meninggal.

2.5 Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut kompilasi hukum Islam, anak angkat tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan atau darah dengan orang tua kandungnya dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Suatu pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang disahkan pada saat anak diangkat. Maka status anak angkat tersebut dalam mendapatkan hak waris di kembalikan lagi. Tujuan diadakannya proses peradilan dalam persoalan pengangkatan anak adalah yang mana mendapatkan kekuatan secara tetap melalui putusan hakim, maka dapat diartikan putusan hakim tersebut antara kedua belah pihak untuk ditaati bersama-sama.²⁵

Di dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang biasanya di berikan kepada orang yang bukan ahli waris. Lalu Wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk

²⁵ Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", Lex Privatum, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013, h. 143

memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris, seperti anak angkat.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 kompilasi hukum islam, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Didalam Kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hukum Islam menetapkan ahli waris atau pembagian harta waris yang ketentuannya sudah menjadi ketetapan bagi ahli waris atau bagiannya dari harta waris tersebut telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumbernya. Ayat yang menjelaskan penegasan terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan setelah menunaikan hutang dan wasiat dari si mayit pada Q.S An-Nisa.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu Sunnah* bahwa hal-hal yang harus di perhatikan sebelum dan ketika harta pusaka di bagikan adalah:

- a. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan,
- b. Syarat-syarat pewarisan,
- c. Rukun waris,
- d. Sebab-sebabmemperoleh warisan".

Dengan demikian dapatlah dipahami. bahwa syari'at Islam tidak mengenal anak angkat (adopsi) yang statusnya dipersamakan dengan anak kandung atau dinasabkan sebagai anak kandung, kecuali hanya sebatas sebagai menyantuni anak tersebut. Demikian juga hukum Islam tidak diperkenankan apabila anak angkat harus mendapat warisan kecuali ada wasiat dari pewaris, itupun tidak boleh melebihi sepertiga. ayyid abiq dalam kitabnya *Fiqhu Sunnah* menjelaskan bahwa, "Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan isnad yang shahih, berkata Thnu . Abbas; merugikan ahli

²⁶ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Tiga Serangkai, Solo, 2017, h. 5

waris didalam wasiat itu termasuk dosa besar". Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-N asai' secara Marfu' , dan rijal hadi tanya juga orang-orang terpercaya."

Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

1. Al-Qur'an Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam. 9 Kandungan pokok Al-Qur'an:

- a. Tauhid (rukun iman)
- b. Tuntutan ibadah
- c. Janji dan saksi
- d. Hukum dan untuk bermasyarakat (berhubungan dengan manusia) dan hubungan dengan Allah
- e. Sejarah Ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

a) Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam QS.AlBaqarah (2) ayat 233. Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 10 warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

b) Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 33 Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. QS. Al-Anfal (8) ayat 75 Artinya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya. (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. QS. Al-Ahzab (33) ayat 6 Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).

c) Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu). As-Sunnah As-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan keterangan Nabi Muhammad Saw. As-sunnah sering disebut juga Hadis. Fungsi As-Sunnah dalam hubungannya dengan Al-Qur'an adalah:

- a. Menjelaskan maksud ayat Al-Qur'an
- b. Menentukan sebagian hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an 12

3. Ijtihad Ijtihad berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Artinya, ijtihad adalah aktivitas menggunakan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum dengan jalan menyimpulkan dari Al-Qur'an dan As-sunnah.

d) Golongan Ahli Waris

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan atau nasabnya.

1. Ahli Waris Laki-laki Ahli waris laki-laki jumlahnya ada 15 orang dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Bapak

- 3) Suami
 - 4) Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki
 - 5) Kakek, yaitu ayahnya bapak
 - 6) Saudara laki-laki sekandung
 - 7) Saudara laki-laki sebapak
 - 8) Saudara laki-laki seibu
 - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung
 - 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sebapak
 - 11) Saudara laki-laki sebapak (paman) sekandung
 - 12) Saudara laki-laki bapak (paman) yang sebapak
 - 13) Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung
 - 14) Sepupu (misan) laki-laki sebapak yaitu anak laki-laki dari paman sebapak
 - 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak Jika ahli waris yang tersebut diatas semuanya ada, maka yang mendapat warisan di antara mereka hanya tiga orang, yaitu anak laki-laki, bapak, suami.
2. Ahli Waris Perempuan Ahli waris perempuan jumlahnya ada 10 orang dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Anak perempuan
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
 - 3) Ibu

- 4) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- 5) Istri
- 6) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
- 7) Saudara perempuan sekandung
- 8) Saudara perempuan seapak
- 9) Saudara perempuan seibu
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Jika ahli waris perempuan tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya tiga orang, yaitu : ibu, anak perempuan dan istri.

Ahli Waris menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

Hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad.

Berikut penjelasannya :

Bagian-bagian para ahli waris menurut Al-Qur'an Tentang Bagian Anak

- a. Allah mensyariatkan bagian warisan anak-anakmu, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
- b. Jika anak perempuan itu dua atau lebih, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan.
- c. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh $\frac{1}{2}$ harta peninggalan.

1. Tentang Bagian Orangtua

- a. Untuk kedua orang tua ibu-bapak, masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan, jika pewaris mempunyai anak.
 - b. Jika pewaris tidak mempunyai anak dan harta peninggalan hanya diwarisi oleh ibu dan bapaknya saja, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
 - c. Jika pewaris meninggalkan dua saudara atau lebih, ibunya mendapat $\frac{1}{6}$.
2. Tentang Bagian Suami dan Istri
- a. Dan bagimu (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan istri istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
 - b. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan istri-istrimu.
 - c. Istri-istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta yang kamu (suami) tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.
 - d. Jika kamu mempunyai anak maka istri-istrimu mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta yang kamu tinggalkan.
 - e. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 17 seorang saudara perempuan atau saudara laki-laki (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua saudara sejenis itu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan.
 - f. Jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang $\frac{1}{3}$ itu.

2.6 Penyelesaian Sengketa Harta warisan

Penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dengan menggunakan metode mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat menciptakan suasana keluarga lebih harmonis kembali karena sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas.²⁷

Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa maka ahli waris dapat menyelesaikannya melalui pengadilan.²⁸

Berperkara di dalam pengadilan maka mediasi akan di tawarkan kembali kepada ahli waris yang bersengketa. Proses mediasi di dalam pengadilan ahli waris yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris lainnya.²⁹

²⁷https://www.google.com/search?q=Penyelesaian+sengketa+waris+menurut+Hukum+Islam&rlz=1C1YTUH_idID1052ID1052&oq=penye&aqs=chrome.2.69i59l3j69i57j0i433i512l4j0i512j0i433i512.4846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

²⁸ Ibid, h.155.

²⁹ Liat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang besar bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi. Mediasi merupakan salah satu cara yang dilakukan ahli waris yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan menghadirkan pihak ketiga.

Keuntungan penyelesaian melalui mediasi salah satunya adalah tidak membutuhkan waktu yang lama, biaya murah, tidak memaksa ahli waris yang bersengketa. Karakter utama dari penyelesaian melalui mediasi adalah mediator hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa ahli waris yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator.³⁰

³⁰ 7 Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. (Visimedia, Jakarta: 2011),h.29.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian lapangan (survey data primer) yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam masyarakat. Perilaku individu yang diteliti adalah perilaku yang muncul dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian ini langsung dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok pembahasan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan penelitian ini di wilayah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa harta warisan di selesaikan di pengadilan agma pasir pengaraian, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.. Menjadi hal yang menarik untuk diteliti

lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa harta waris di pengadilan agama

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan berupa data primer, data sekunder dan data tertier yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini, di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder adalah dokumen hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah, melengkapi, memperkuat dan menjelaskan data hukum primer. Adapun data hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh pada peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan dokumen yang ada pada tempat penelitian.
- c. Data tertier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus bahasa Indonesia dan Arab, ensiklopedi, naskah akademik, dan Rancangan Undang-Undang.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu panduan yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut dapat terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait masalah yang akan diteliti, dalam hal ini diambil yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hulu.
2. Observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dengan observasi dapat mengumpulkan data secara lebih cermat, detail dan terperinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat digunakan sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³¹ Populasi adalah kumpulan atau sekumpulan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 172

objek yang memiliki kesamaan karakteristik.³² Jadi populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama, Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;
2. Ibu Tiri
3. Anak Angkat

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan kumpulan atau sebagian kumpulan dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan dari populasi penelitian.³³ Metode sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili dari jumlah populasi yang ada dan kategorinya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk memperjelas mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hal. 118

³³ *Ibid*, hal. 119

Tabel I
Populasi dan Sampel

NO	keterangan	populasi	sampel
1.	Hakim Pengadilan Agama, Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;	1	1
2.	Ibu Tiri	1	1
3.	Anak Angkat	1	1

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3.7 Defenisi Konseptual

Dalam hal ini memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Perkawinan

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

3. Kedudukan anak angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

4. Harta warisan

Harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Pembagian harta warisan

biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat.

5. Pembagian hak waris

Pembagian Harta Waris pada Islam adalah harta yang diberikan dari orang yg sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya.